



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2024

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN



dinkes@bangkalankab.go.id



(031) 3095381

<https://dinkes.bangkalankab.go.id>



Jl. Raya Ketengan Burneh, Bangkalan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

DINAS KESEHATAN

Tahun 2024



DINAS KESEHATAN

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DINAS KESEHATAN merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-1 pelaksanaan Rencana Strategis DINAS KESEHATAN Tahun 2024-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis DINAS KESEHATAN Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DINAS KESEHATAN. Kinerja DINAS KESEHATAN diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DINAS KESEHATAN Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja DINAS KESEHATAN Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan DINAS KESEHATAN pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangkalan, 18 Februari 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bangkalan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- C. Isu Strategis Perangkat Daerah
- D. Landasan Hukum
- E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kinerja Tahun 2024
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH

MATRIKS RENSTRA

SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, DINAS KESEHATAN selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut DINAS KESEHATAN diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS KESEHATAN Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Dinas Kesehatan mempunyai tugas: Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan.

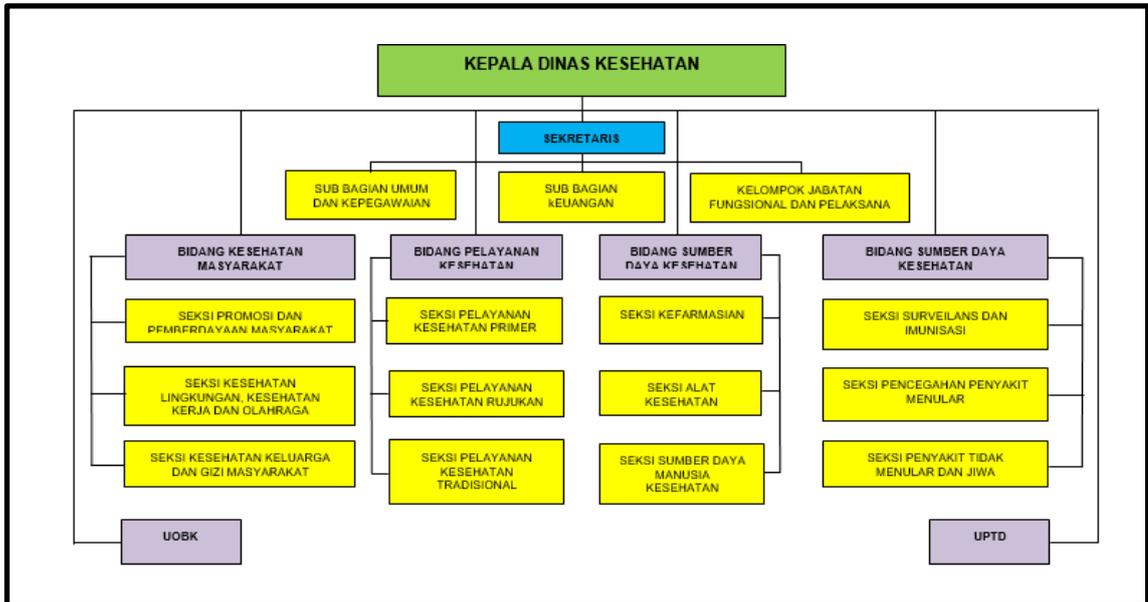
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan daerah bidang kesehatan;
- Pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesehatan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang kesehatan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakkerja yaitu Kepala Dinas Kesehatan sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bagian, UOBK dan UPTD. Berikut bagan struktur organisasi DINAS KESEHATAN.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan



B. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra DINAS KESEHATAN periode 2024-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dan distribusi tenaga kesehatan;
2. Belum optimalnya manajemen dan mutu pelayanan kesehatan;
3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana Kesehatan sesuai standart;
4. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi;
5. Belum optimalnya penanganan masalah gizi dan masih ditemukan kasus stunting;
6. Masih rendahnya masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat dan adanya masalahnya kesehatan lingkungan;
7. Masih tingginya angka kesakitan yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular.

C. Landasan Hukum

Laporan Kinerja DINAS KESEHATAN ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 ;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS KESEHATAN Tahun 2024 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis DINAS KESEHATAN adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini DINAS KESEHATAN. Rencana Strategis DINAS KESEHATAN yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E). Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis DINAS KESEHATAN dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra DINAS KESEHATAN tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra DINAS KESEHATAN telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Tahun 2024-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra DINAS KESEHATAN merupakan hasil kesepakatan bersama antara DINAS KESEHATAN dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra DINAS KESEHATAN tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja DINAS KESEHATAN dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Tahun 2024-2026 sebanyak satu tujuan dan lima sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target DINAS KESEHATAN sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
DINAS KESEHATAN

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			Angka Harapan Hidup	71	71.33	71.5
		1.1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80
				Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	70	72	75
				Nilai SAKIP RSUD	64	70	70
				Cost Recovery Rate (CRR)	100%	100%	100%
		1.2	Meningkatnya Mutu Pelayanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standart	100%	100%	100%
				Persentase Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	80%	80%	80%
				Survey Kepuasan Masyarakat	88.31%	88.5%	88.7%

Sumber : Renstra DINAS KESEHATAN periode 2024-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama DINAS KESEHATAN tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
DINAS KESEHATAN

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	
1.1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks
		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai
		Nilai SAKIP RSUD	Nilai
		Cost Recovery Rate (CRR)	prosentase
1.2	Meningkatnya Mutu Pelayanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standart	prosentase
		Persentase Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	prosentase
		Survey Kepuasan Masyarakat	prosentase

Sumber : Indikator Kinerja Utama DINAS KESEHATAN Tahun 2024

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja DINAS KESEHATAN Tahun 2024 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2024
DINAS KESEHATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Angka Harapan Hidup		71	
		1.1.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75
				Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai	70
				Nilai SAKIP RSUD	Nilai	64
				Cost Recovery Rate (CRR)	Prosentase	100%
		1.2	Meningkatnya Mutu Pelayanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standart	Prosentase	100%
				Persentase Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Prosentase	80%
				Survey Kepuasan Masyarakat	Prosentase	88.31%

Sumber : Rencana Kerja DINAS KESEHATAN tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian DINAS KESEHATAN Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 08 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala DINAS KESEHATAN telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja DINAS KESEHATAN Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Meningkatnya mutu pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	75
		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	70
		Nilai SAKIP RSUD	64
		Cost Recovery Rate (CRR)	100%
1.2	Meningkatnya mutu pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat	Persentase Pelayanan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standart	100%
		Persentase Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	80%
		Survey Kepuasan Masyarakat	88,31%

Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS KESEHATAN Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan DINAS KESEHATAN :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan DINAS KESEHATAN Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1275 Orang/ Bulan
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18 Laporan
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah pada dinas kesehatan	100%
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	14 Laporan
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya administrasi kepegawaian pada Dinas Kesehatan	100%
1.4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Laporan
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
1.5.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	100%
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit
1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Laporan
1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit
1.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit
1.9	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana	100%
1.9.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pada Puskesmas Bangkalan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Bangkalan	1 Unit Kerja
1.9.2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Arosbaya	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Arosbaya	1 Unit Kerja
1.9.3	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas pada Puskesmas Burneh	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Burneh	1 Unit Kerja
1.9.4	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Banjar	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Banjar	1 Unit Kerja

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.9.5	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Blega	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Blega	1 Unit Kerja
1.9.6	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Galis	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Galis	1 Unit Kerja
1.9.7	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Geger	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Geger	1 Unit Kerja
1.9.8	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Jaddih	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Jaddih	1 Unit Kerja
1.9.9	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kamal	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Kamal	1 Unit Kerja
1.9.10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kedungdung	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Kedungdung	1 Unit Kerja
1.9.11	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Klampis	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Klampis	1 Unit Kerja
1.9.12	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kokop	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Kokop	1 Unit Kerja
1.9.13	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Konang	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Konang	1 Unit Kerja
1.9.14	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kwanyar	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Kwanyar	1 Unit Kerja
1.9.15	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Modung	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Modung	1 Unit Kerja
1.9.16	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Sepulu	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Sepulu	1 Unit Kerja
1.9.17	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Socah	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Socah	1 Unit Kerja
1.9.18	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Sukolilo	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Sukolilo	1 Unit Kerja
1.9.19	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tanah Merah	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Tanah Merah	1 Unit Kerja
1.9.20	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tanjung Bumi	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Tanjung Bumi	1 Unit Kerja
1.9.21	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tongguh	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Tongguh	1 Unit Kerja
1.9.22	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tragah	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Tragah	1 Unit Kerja
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna	100%
		Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart	70%
		Angka Kematian Ibu (AKI)	4.4
		Angka Kematian Bayi (AKB)	32.3
		Prevalensi Stunting	14

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan Lansia	100%
		Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	100%
		Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan	100%
		Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	14%
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Disediakan	100%
2.1.1	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit
2.1.2	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit
2.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	5 Unit
2.1.4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	51 Unit
2.1.5	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	507 Unit
2.1.6	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	258 Paket
2.1.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1464 Keluarga
2.1.8	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%
2.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19305 Orang
2.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19265 Orang
2.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18848 Orang
2.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	84840 Orang
2.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	143163 Orang
2.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	728938 Orang
2.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	130956 Orang
2.2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	56410 Orang

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14958 Orang
2.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	2095 Orang
2.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan sesuai standar	16542 Orang
2.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapat pelayanan sesuai standar	19102 Orang
2.2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1 Dokumen
2.2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	3 Dokumen
2.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	3 Dokumen
2.2.16	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	6 Dokumen
2.2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri. dan Tradisional Lainnya	20 Dokumen
2.2.18	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen
2.2.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	70 Orang
2.2.20	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	2 Dokumen
2.2.21	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	1 Dokumen
2.2.22	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	1 Paket
2.2.23	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Bangkalan)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen
2.2.24	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Tanah Merah)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen
2.2.25	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Tragah)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen
2.2.26	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Klampis)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen
2.2.27	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Kamal)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen
2.2.28	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Modung)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen
2.2.29	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Konang)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen
2.2.30	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Arosbaya)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen
2.2.31	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Sukolilo)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen
2.2.32	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Geger)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen
2.2.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Burneh)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen
2.2.34	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Banjar)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.2.35	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Tanjung Bumi)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen
2.2.36	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Socah)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen
2.2.37	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Kokop)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen
2.2.38	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Tongguh)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen
2.2.39	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Kedundung)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen
2.2.40	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Blega)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen
2.2.41	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Kwanyar)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen
2.2.42	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Jaddih)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen
2.2.43	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Sepulu)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen
2.2.44	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Galis)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen
2.2.45	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen
2.2.46	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan
2.2.47	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	1 Dokumen
2.2.48	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit
2.2.49	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	400 Orang
2.2.50	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen
2.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100%
2.3.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	1 Dokumen
2.4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pada Dinas Kesehatan	100%
2.4.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	19 Unit
2.4.2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	36 Unit
2.4.3	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	2 Dokumen
3.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Ijin Praktek (SIP)	70%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dan pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	100%
3.1.1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen
3.1.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	347 Orang
3.1.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	2 Dokumen
3.2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%
3.2.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kesehatan yang menjadi sasaran pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis	400 Orang
4.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) serta Industri Rumah Tangga (IRT) yang telah Tervalidasi Perijinan	92%
4.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%
4.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2 Dokumen
4.2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100%
4.2.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	3 Dokumen
4.3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100%
4.3.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	jumlah Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar yang dilakukan pemeriksaan Post Market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	70 Unit
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang diBina	85%
5.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas	Prosentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
5.1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen
5.2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80%
5.2.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen
5.3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100%
5.3.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS KESEHATAN Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. DINAS KESEHATAN selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS KESEHATAN yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi DINAS KESEHATAN.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, DINAS KESEHATAN dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja DINAS KESEHATAN Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama DINAS KESEHATAN.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah,

sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, DINAS KESEHATAN juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama DINAS KESEHATAN tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
DINAS KESEHATAN Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks
		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai
		Nilai SAKIP RSUD	Nilai
		Cost Recovery Rate (CRR)	%
	Meningkatnya mutu pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat	Persentase Pelayanan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standart	%
		Persentase Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	%
		Survey Kepuasan Masyarakat	%

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,29	73,47	73,43	99,95%
1.1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	75	84,75	113,00%
		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan		70	62,05	88,64%

		Nilai SAKIP RSUD		64	63,10	98,59%
		Cost Recovery Rate (CRR)		100	92,34%	92,34%
1.2	Meningkatnya Mutu Pelayanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standart	-	100	100%	100,00%
		Persentase Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	-	80		
		Survey Kepuasan Masyarakat	-	88.31	89,12%	100,92%

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DINAS KESEHATAN periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,43	71	
1.1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	75	1%
		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan		70	0%
		Nilai SAKIP RSUD	89,12%	64	1%
		Cost Recovery Rate (CRR)	84,75	100	113%
1.2	Meningkatnya Mutu Pelayanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standart	62,05	100	89%
		Persentase Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	63,10	80	99%
		Survey Kepuasan Masyarakat	92,34%	88.31	1%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,43	72,39	101%
1.1.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,75	-	-
		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	62,05	-	-
		Nilai SAKIP RSUD	63,10	-	-
		Cost Recovery Rate (CRR)	92,34%	-	-
1.2	Meningkatnya Mutu Pelayanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standart	100%	-	-
		Persentase Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat			
		Survey Kepuasan Masyarakat	89,12%	-	-

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	99,95%				
1.1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	113,00%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan	100%	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	100%	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semester an SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester an SKPD	100%	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah pada dinas kesehatan	100%	
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	100%	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya administrasi kepegawaian pada Dinas Kesehatan	100%	
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	100%	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100%	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	100%	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau	100%	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	100%	
				Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana	100%	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pada Puskesmas Bangkalan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Bangkalan	100%	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Arosbaya	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Arosbaya	100%	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas pada Puskesmas Burneh	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Burneh	100%	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Banjar	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Banjar	100%	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Blega	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Blega	100%	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Galis	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Galis	100%	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Geger	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Geger	100%	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Jaddih	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Jaddih	100%	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kamal	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Kamal	100%	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kedungdung	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Kedungdung	100%	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Klampis	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Klampis	100%	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kokop	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Kokop	100%	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Konang	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Konang	100%	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan	100%	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				BLUD pada Puskesmas Kwanyar	dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Kwanyar		
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Modung	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Modung	100%	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Sepulu	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Sepulu	100%	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Socah	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Socah	100%	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Sukolilo	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Sukolilo	100%	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tanah Merah	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Tanah Merah	100%	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tanjung Bumi	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Tanjung Bumi	100%	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tongguh	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Tongguh	100%	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tragah	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas Tragah	100%	
1.2	Meningkatnya Mutu Pelayanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standart		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna	100%	
					Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat, Vaksin dan BMHP) sesuai Standart	100%	
					Angka Kematian Ibu (AKI)	158,18%	
					Angka Kematian Bayi (AKB)	62,27%	
					Prevalensi Stunting	19,00%	
					Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan Lansia	98,16%	
					Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	100%	
					Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	100%	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan	100%	
					Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Disediakan	98%	
				Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	100%	
				Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	100%	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	100%	
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100%	
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar		
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		
				Distribusi alat kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	100%	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96%	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan sesuai standar		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapat pelayanan sesuai standar		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan		
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri. dan Tradisional Lainnya		

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
				Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular		
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat		
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	100%	
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Bangkalan)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Tanah Merah)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Tragah)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Klampis)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Kamal)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Modung)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Konang)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Arosbaya)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Sukolilo)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Geger)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Burneh)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Banjar)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Tanjung Bumi)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Socah)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Kokop)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Tongguh)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Kedundung)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Blega)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Kwanyar)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Jaddih)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Sepulu)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	
				Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Galis)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%	
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100%	
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	100%	
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100%	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100%	
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	100%	
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100%	
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	100%	
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	100%	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Pada Dinas Kesehatan		
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	100%	
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	99%	
				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	100%	
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Ijin Praktek (SIP)	100%	
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dan pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	100%	
				Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	100%	
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	100%	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kesehatan yang menjadi sasaran pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis	100%	
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) serta Industri Rumah Tangga (IRT) yang telah Tervalidasi Perijinan	100%	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%	
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%	
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100%	
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100%	
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100%	
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	jumlah Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar yang dilakukan pemeriksaan Post Market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	100%	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang diBina	100%	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat	Prosentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Daerah Kabupaten/Kota			
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100%	
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100%	
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100%	
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	99%	

B. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	175.740.055.553	149.736.613.898	85%
1.1	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.253.950	36.883.700	96%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.662.200	14.405.950	98%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.604.750	11.869.450	94%
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.782.000	Rp3.743.050	99%
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.205.000	Rp6.865.250	95%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	89.695.344.352	84.112.453.330	94%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	89.690.339.102	Rp84.107.478.330	94%
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	5.005.250	Rp4.975.000	99%
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.800.000	2.800.000	100%
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.800.000	Rp2.800.000	100%
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100%
1.4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000	Rp5.000.000	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	100%
1.5.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.500.000	Rp2.490.000	100%
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.276.150	208.270.400	90%
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.000.000	Rp46.675.000	79%
1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	173.276.150	Rp161.595.400	93%
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	518.126.509	460.012.889	89%
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.779.774	Rp279.882.959	93%
1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.346.735	Rp180.129.930	83%
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	988.288.400	635.882.680	64%
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.878.300	Rp78.837.568	81%
1.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	890.410.100	Rp557.045.112	63%
1.9	Peningkatan Pelayanan BLUD	84.257.466.192	64.272.810.899	76%
1.9.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Arosbaya	2.998.102.880	Rp1.809.271.641	60%
1.9.2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Bangkalan	3.963.374.058	Rp2.053.874.787	52%
1.9.3	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Banjar	1.990.813.166	Rp1.260.118.695	63%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.9.4	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Blega	6.350.743.028	Rp5.811.723.376	92%
1.9.5	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Burneh	3.681.971.711	Rp2.000.351.839	54%
1.9.6	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Galis	4.504.985.124	Rp3.894.305.126	86%
1.9.7	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Geger	6.143.441.865	Rp3.950.273.619	64%
1.9.8	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Jaddih	2.117.302.714	Rp1.938.555.280	92%
1.9.9	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kamal	4.174.944.307	Rp3.616.744.435	87%
1.9.10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kedundung	3.002.415.923	Rp1.918.399.260	64%
1.9.11	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Klampis	3.985.582.813	Rp3.696.731.105	93%
1.9.12	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kokop	5.969.236.083	Rp5.293.405.965	89%
1.9.13	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Konang	5.639.982.503	Rp4.789.640.030	85%
1.9.14	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kwanyar	4.859.345.241	Rp2.305.554.123	47%
1.9.15	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Modung	2.172.196.482	Rp1.919.720.605	88%
1.9.16	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Sepulu	3.852.159.810	Rp2.901.065.660	75%
1.9.17	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Socah	2.429.662.921	Rp2.184.497.508	90%
1.9.18	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Sukolilo	3.304.188.219	Rp1.913.100.972	58%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.9.18	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tanah Merah	5.781.434.387	Rp5.022.769.027	87%
1.9.20	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tanjung Bumi	3.286.895.100	Rp2.826.306.716	86%
1.9.21	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tongguh	1.729.846.935	Rp1.144.909.487	66%
1.9.22	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tragah	2.318.840.922	Rp2.021.491.643	87%
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp99.446.802.816	Rp90.263.673.529	91%
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp22.647.171.655	Rp18.291.216.073	81%
2.1.1	Pembangunan Puskesmas	11.865.240.000	Rp10.596.178.795	89%
2.1.2	Pengembangan Puskesmas	740.000.000	Rp737.000.000	100%
2.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.000.000.000	Rp991.870.196	99%
2.1.4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.871.167.465	Rp2.657.152.650	93%
2.1.5	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	433.757.000	Rp310.903.650	72%
2.1.6	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5.490.638.307	Rp2.774.006.232	51%
2.1.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	88.327.383	Rp88.322.150	100%
2.1.8	Distribusi alat kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai,	158.041.500	135.782.400	86%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp76.610.123.761	Rp71.784.023.006	94%
2.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9.915.000	Rp5.705.500	58%
2.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16.650.000	Rp15.750.000	95%
2.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	262.150.629	Rp220.072.500	84%
2.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	11.375.500	Rp5.865.000	52%
2.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.015.000	Rp15.120.000	80%
2.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	22.195.000	Rp16.455.000	74%
2.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	18.750.000	Rp16.220.000	87%
2.2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	23.305.000	Rp14.160.000	61%
2.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.752.333.446	Rp1.661.345.700	95%
2.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	36.405.000	Rp22.112.500	61%
2.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.496.832.200	Rp1.460.640.750	98%
2.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	223.170.100	Rp186.166.000	83%
2.2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	220.343.000	Rp205.265.950	93%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	131.700.000	Rp60.747.400	46%
2.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.328.387.500	Rp2.138.987.500	92%
2.2.16	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	290.634.000	Rp175.315.000	60%
2.2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	7.140.000	Rp7.139.900	100%
2.2.18	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	168.700.000	Rp68.625.000	41%
2.2.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	86.716.000	0	0%
2.2.20	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.711.548.382	Rp1.366.203.306	80%
2.2.21	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	48.969.144.968	Rp48.511.652.062	99%
2.2.22	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	31.240.000	Rp21.045.000	67%
2.2.24	Operasional Pelayanan Puskesmas Arosbaya	Rp823.372.000	Rp406.105.000	49%
2.2.25	Operasional Pelayanan Puskesmas Bangkalan	Rp820.704.000	Rp590.267.796	72%
2.2.26	Operasional Pelayanan Puskesmas Banjar	Rp800.217.000	Rp697.244.173	87%
2.2.27	Operasional Pelayanan Puskesmas Blega	Rp893.670.000	Rp844.159.763	94%
2.2.28	Operasional Pelayanan Puskesmas Burneh	Rp899.782.000	Rp844.697.570	94%
2.2.29	Operasional Pelayanan Puskesmas Galis	Rp908.106.000	Rp763.286.277	84%
2.2.30	Operasional Pelayanan Puskesmas Geger	Rp903.319.000	Rp799.944.324	89%
2.2.31	Operasional Pelayanan Puskesmas Jaddih	Rp700.823.000	Rp312.356.000	45%
2.2.32	Operasional Pelayanan Puskesmas Kamal	Rp802.492.000	Rp779.188.423	97%
2.2.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Kedundung	Rp803.152.000	Rp769.490.763	96%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.2.34	Operasional Pelayanan Puskesmas Klampis	Rp903.706.000	Rp807.489.244	89%
2.2.35	Operasional Pelayanan Puskesmas Kokop	Rp763.023.000	Rp383.136.500	50%
2.2.36	Operasional Pelayanan Puskesmas Konang	Rp834.949.000	Rp691.640.513	83%
2.2.37	Operasional Pelayanan Puskesmas Kwanyar	Rp930.101.000	Rp792.990.872	85%
2.2.38	Operasional Pelayanan Puskesmas Modung	Rp711.532.000	Rp610.397.433	86%
2.2.39	Operasional Pelayanan Puskesmas Sepulu	Rp907.831.000	Rp899.937.650	99%
2.2.40	Operasional Pelayanan Puskesmas Socah	Rp600.415.000	Rp551.843.000	92%
2.2.41	Operasional Pelayanan Puskesmas Sukolilo	Rp754.031.000	Rp698.852.202	93%
2.2.44	Operasional Pelayanan Puskesmas Tanah Merah	Rp908.592.000	Rp839.776.932	92%
2.2.45	Operasional Pelayanan Puskesmas Tanjung Bumi	Rp875.482.000	Rp847.294.858	97%
2.2.46	Operasional Pelayanan Puskesmas Tongguh	Rp786.680.000	Rp709.881.845	90%
2.2.47	Operasional Pelayanan Puskesmas Tragah	Rp785.431.000	Rp380.851.000	48%
2.2.48	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	15.450.000	Rp15.450.000	100%
2.2.49	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	141.260.000	Rp116.760.000	83%
2.2.50	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	26.110.000	Rp26.110.000	100%
2.2.51	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	268.734.700	Rp268.724.000	100%
2.2.52	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Rp6.468.336	Rp4.132.800	64%
2.2.53	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Rp197.040.000	Rp137.420.000	70%
2.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	29.950.650	Rp29.950.250	100%
2.3.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	29.950.650	Rp29.950.250	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	159.556.750	158.484.200	99%
2.4.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	10.000.000	Rp9.999.750	100%
2.4.2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	29.556.750	Rp28.511.200	96%
2.4.3	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	120.000.000	Rp119.973.250	100%
3.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.155.341.082	Rp7.446.649.527	91%
3.1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	6.842.774.182	Rp6.298.485.527	92%
3.1.1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.000.000	Rp10.000.000	100%
3.1.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	6.671.785.182	Rp6.139.736.527	92%
3.1.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	160.989.000	Rp148.749.000	92%
3.2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.312.566.900	Rp1.148.164.000	87%
3.2.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya	1.312.566.900	Rp1.148.164.000	87%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
4.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	490.631.000	382.907.425	78%
4.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	81.000.000	Rp64.953.250	80%
4.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	81.000.000	Rp64.953.250	80%
4.2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	212.282.500	Rp146.282.500	69%
4.2.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	212.282.500	Rp146.282.500	69%
4.3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	197.348.500	Rp171.671.675	87%
4.3.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-	197.348.500	Rp171.671.675	87%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp294.243.500	Rp195.136.800	66%
5.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp182.243.500	Rp103.272.000	57%
5.1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	182.243.500	Rp103.272.000	57%
5.2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	60.000.000	100%
5.2.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	60.000.000	60.000.000	100%
5.3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp52.000.000	Rp31.864.800	61%
5.3.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	52.000.000	Rp31.864.800	61%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DINAS KESEHATAN Tahun 2024 Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS KESEHATAN Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja DINAS KESEHATAN dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 DINAS KESEHATAN menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 7 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Dinas Kesehatan Memiliki program sebanyak 5 program, kegiatan sebanyak 21 kegiatan dan sub kegiatan sebanyak 111 sub kegiatan.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 284.127.073.951 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 259.788.904.515, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 91,43%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINAS KESEHATAN ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DINAS KESEHATAN kepada pihak-pihak

terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Bangkalan, 18 Februari 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bangkalan

